



M/AGUNG WIBOWO

PEKERJA EKONOMI KREATIF TERBANYAK: Pedagang melayani pembeli di pusat kuliner G Town Square Gading Serpong, Tangerang, Banten, kemarin. Data Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan jumlah pekerja ekonomi kreatif paling banyak berasal dari subsektor kuliner, sebesar 56,86% dari total pekerja ekonomi kreatif pada 2021 yang mencapai 21,90 juta orang. Angka pekerja kuliner mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 55,03%.

Optimalkan Pemanfaatan Dana Pensiun Nasional

Kontribusi dana pensiun terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional diperkirakan mampu menyentuh 30%, atau sekitar Rp500 triliun.

M ILHAM RAMADHAN AVISENA
ilham@mediaindonesia.com

INDONESIA dapat lolos dari perangkap status negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) melalui pengembangan sektor keuangan, utamanya dana pensiun. Bila dana pensiun dimanfaatkan secara optimal, kontribusi hal itu terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional diperkirakan mampu menyentuh 30%, atau sekitar Rp500 triliun.

"Kalau kita pakai standar OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), itu bisa 30% lebih.

Tiga puluh persen lebih itu, kalau di 2021 PDB kita sekitar US\$1,1 triliun, itu berarti dana pensiun kita potensinya bisa US\$330 juta, atau hampir Rp500 triliun," ujar Head of Indonesia Financial Group (IFG) Progress Reza Yamora Siregar dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Potensi itu sedianya terlihat dari porsi ketenagakerjaan nasional. Saat ini, jumlah pekerja formal yang ada di Indonesia mencapai 50% dari total tenaga kerja. Dari jumlah itu, hanya 25% pekerja formal yang telah mengakses dana pensiun.

Dus, masih ada 25% pe-

kerja formal, atau bahkan lebih yang dapat didorong untuk ikut mengoptimalkan pertumbuhan dan pengembangan dana pensiun. Jumlah itu disebut amat besar dan akan memberikan dorongan lebih terhadap kontribusi dana pensiun ke perekonomian dalam negeri.

"Itu besar sekali. Kalau kita bisa punya 30% dari PDB tadi, kita pasti akan berkurang ketergantungan terhadap utang luar negeri, terhadap investasi asing langsung. Itu yang dilakukan Malaysia dan Singapura. Mereka mengumpulkan dana pensiun, dikelola sendiri," jelas Reza.

Dengan kata lain, pertumbuhan dana pensiun dapat mengerek Indonesia keluar dari status *middle income trap* seperti yang dicanangkan pemerintah. Hal yang perlu dilakukan ialah melakukan

perbandingan atau merujuk keadaan dan perkembangan dana pensiun di negara maju saat ini.

Peningkatan literasi

Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko di kesempatan yang sama mengungkapkan kunci utama untuk mengembangkan sektor keuangan, utamanya di dana pensiun, ialah melalui peningkatan literasi masyarakat. Menurutnya, masih banyak salah pemahaman di publik mengenai dana pensiun.

"Dana pensiun yang menjadi bagian dari asuransi itu mestinya dipahami sebagai proteksi. Dengan adanya dana pensiun, itu merupakan cara menjaga standar dan kualitas hidup ketika usia tidak lagi produktif," terang dia.

Sementara itu, Associate Director untuk Penelitian LPEM

FEB UI Jahen Fachrul Rezki menyatakan sependapat, pengembangan dan pendalaman sektor keuangan nasional dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan dana pensiun.

Itu juga menjadi hal yang penting lantaran Indonesia memiliki bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan.

Bonus demografi itu semestinya bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dana pensiun.

"Kami merasa bahwa penting untuk paham masalah pensiun karena ini penting bagi *social security* bagi masyarakat. Mereka harus punya *safety net* ketika, misal, nanti ada *shock*, atau ketika masa tua tidak lagi memiliki pendapatan, ada uang yang bisa digunakan untuk mengisi kebutuhan mereka," pungkash Jen. (E-3)

Pertamina Hulu Energi Raih Laba US\$4,67 M

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku *subholding upstream* Pertamina mencatatkan pertumbuhan produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 7% dan laba bersih senilai US\$4,67 miliar pada 2022.

Hal itu diinformasikan PHE saat melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) tahun buku 2022 di Jakarta, Senin (15/5). Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati yang hadir langsung sebagai

pemegang saham mayoritas PHE mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut karena pada 2022 mereka memiliki berbagai tantangan yang telah diatasi dengan baik.

"Kami sangat bersyukur. Meskipun banyak tantangan yang tidak mudah dilalui, PHE berhasil mencapai produksi hampir 1 juta boepd (*barrels of oil equivalent per day*) atau sebesar 967 mboepd (*thousand barrels of oil equivalents per day*) dari 65 blok migas di

2022. Kontribusi nasional PHE juga semakin signifikan atas *lifting* minyak sebesar 68% dan *lifting* gas sebesar 33%. Per hari ini, produksi migas Pertamina telah melampaui 1 juta boepd," kata Nicke usai pelaksanaan RUPST seperti dikutip dari keterangan tertulisnya.

Hal tersebut, kata Nicke, tidak lepas juga dari strategi Pertamina dalam membentuk konsep *holding-subholding* sehingga PHE memiliki fleksibil-

itas yang cukup dalam menyusun strategi dan mengambil keputusan yang cepat sesuai dengan situasi ekosistem bisnis yang dinamis.

Direktur Utama PHE Wiko Migantoro menyatakan, dengan realisasi investasi sebesar US\$3,2 miliar dan *operational expenditure* (opex) US\$5,9 miliar dalam melaksanakan 689 sumur pengembangan, 638 *workover*, reaktivasi sumur dan *waterflood*, PHE menjadi kontributor pen-

ting dalam peran serta membangun ekonomi nasional kegiatan aktivitas hulu migas.

Selain itu, PHE melaporkan capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) industri hulu migas PHE sebesar 65% sebagai upaya dalam membangun kapasitas nasional di industri hulu migas. Secara total PHE berkontribusi sebesar US\$8,77 miliar yang terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, dan *signature bonus*. (Ant/E-1)



DOK INDAH KIAT

RUPS INDAH KIAT: Direktur Utama PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) Hendra Jaya Kosasih (kanan) berbincang dengan Wakil Direktur Utama Suhendra Wiradinata dalam RUPS PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk di Jakarta, kemarin. INKP mencatatkan laba neto konsolidasian sebesar US\$858 juta pada 2022, meningkat 62,9% jika dibandingkan dengan pada 2021.

Akselerasi Peremajaan Sawit Kementan Kerahkan Gugus Tugas

PEMERINTAH mengakselerasi peremajaan kelapa sawit dengan membentuk Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor minyak kelapa sawit periode Januari-Februari 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,62% jika dibandingkan dengan pada 2022 di periode yang sama. Hal itu menunjukkan komoditas kelapa sawit tetap eksis, bahkan menjadi penopang komoditas ekspor pertanian.

"Sawit ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak segera lakukan suatu langkah komprehensif. Dalam rangka mendorong hal tersebut, Kementan hadir berikan solusi tepat guna, melalui

program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang setiap tahunnya ditargetkan seluas 180 ribu hektare yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit," kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat melepas gugus tugas tersebut di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, kemarin.

Ia mengapresiasi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan atas gagasan PSR dalam mengakselerasi program PSR melalui pembentukan tim gugus tugas tersebut. Ia berharap gugus tugas itu dapat mendorong akselerasi capaian program PSR sekaligus mengurai permasalahan dan kendala di daerah, baik dalam pengurusan maupun dalam pelaksanaan program PSR.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Andi Nur

Alam Syah menambahkan, gugus tugas itu merupakan implementasi konkret untuk mencapai target program PSR. Kementan menyiapkan 30% dari personel di Ditjen Perkebunan unntuk diterjunkan di delapan provinsi sentra peremajaan, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

"Kami juga berkolaborasi dan bersinergi dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang berada di delapan provinsi sentra peremajaan kelapa sawit," tuturnya.

Sejak 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180 ribu hektare per tahun. (Fik/E-2)

Harga Pakan Naik Telur Ayam Melambung

DIREKTUR Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengakui terjadinya kenaikan harga rata-rata telur ayam ras nasional di beberapa daerah. Melambungnya harga telur ayam tersebut dipicu kenaikan harga pakan.

Berdasarkan pantauan Kemendag, harga rata-rata telur ayam ras nasional di tingkat eceran per 15 Mei 2023 sebesar Rp31.100 per kilogram (kg), atau naik 3,8% jika dibandingkan dengan bulan lalu.

"Kenaikan itu juga sejalan dengan kenaikan harga telur ayam ras nasional di tingkat peternak per 14 Mei 2023 sebesar Rp28.400 per kg atau naik 16% kalau dibandingkan dengan bulan lalu," kata Isy kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Isy menjelaskan, melambungnya harga telur ayam ras tersebut sebagian besar dipicu kenaikan harga pakan. Berdasarkan informasi dari peternak, saat ini harga pakan berkisar Rp7.300 sampai dengan Rp7.500 per kg.

Tingginya harga pakan tersebut, lanjut Isy, merupakan refleksi dari harga bahan baku pakan, salah satunya

jagung pipilan. Saat ini harga jagung pipilan berada di kisaran Rp5.800 sampai dengan Rp6.000 per kg atau sekitar 25% di atas harga acuan Rp5.000 per kg.

"Selain itu, rata-rata harga bahan baku pakan lain asal impor seperti bungkil kedelai dan tepung daging dan tulang 2023 pun masih cukup tinggi kalau dibandingkan dengan rata-rata 2022," ujarnya.

Ke depannya, Isy mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan para pelaku usaha dalam mengupayakan ketersediaan telur, pakan, dan bahan baku pakan yang lebih terjangkau dengan mengutamakan serapan produksi dalam negeri.

Selain itu, pihaknya akan menyiapkan bantuan telur ayam ras untuk masyarakat yang terdampak akan kenaikan harga tersebut. Kemudian, pihaknya juga akan membantu para peternak khususnya skala mikro dan kecil dengan memberikan bantuan jagung pakan untuk menjaga efisiensi peternak. "Pemerintah akan tetap mempertimbangkan keseimbangan baik di sisi produsen maupun konsumen," pungkasnya. (Fik/E-3)

Tiga RPP Prioritas P2SK Dikebut dalam 2 Bulan

UNDANG-UNDANG Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang baru disahkan pada 13 Januari 2023 memiliki tengat enam bulan untuk perumusan turunan aturan dan dilanjutkan dengan masa transisi dari implementasi UU tersebut selama dua setelah diundangkan.

Analisis Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan April Sya'bani mengatakan ada aturan turunan yang dibangun dari dasar dan ada yang hanya berupa penyesuaian karena telah memiliki dasar hukum dari aturan yang telah ada.

"Ada sekitar 14-17 rancangan peraturan pemerintah (RPP) Tahun ini sesuai dengan mekanisme penyusunan RPP, pemerintah harus mendapatkan surat izin prakarsa dari Presiden. Untuk tahun ini, ada tiga RPP prioritas yang harus dilaksanakan," kata April dalam diskusi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), kemarin.

Satu RPP terkait dengan penguatan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

di bagian stabilitas. Kedua mengenai anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiga terkait dengan pasar modal, RPP itu berhubungan dengan derivasi keuangan dan aset kripto.

Saat ini Kementerian Keuangan bersama OJK, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sedang mendalami RPP derivasi dan aset kripto untuk mencapai sebuah rumusan final.

RPP mengamankan peralihan derivasi keuangan yang *underlying*-nya efek dari Bappebti ke OJK, dan yang *underlying*-nya instrumen pasar uang dan valas ke Bank Indonesia. Sementara itu, Bappebti akan masih memegang derivasi komoditas. Proses transisinya maksimal dua tahun setelah undang-undang diundangkan.

Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal OJK Luthfy Z Fuady menjelaskan aturan turunannya sedang dikerjakan OJK, khususnya di bidang pengaturan pasar modal derivatif dan busa karbon. (Try/E-1)



PT SIANTAR TOP TBK
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN



PT SIANTAR TOP TBK
(“Company”)
ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023.

It is hereby announced to the Shareholders of the Company that the Company will be holding Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on Friday, June 23rd 2023.

Pengumuman untuk Rapat akan diumumkan melalui (i) situs web Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, (ii) situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni www.ksei.co.id, dan (iii) situs web Perseroan yakni www.siantartop.co.id pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023.

Invitations for the Meeting will be announced through (i) the website of the Indonesia Stock Exchange, namely www.idx.co.id, (ii) the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, namely www.ksei.co.id and (iii) the Company's website www.siantartop.co.id on Thursday 1st June 2023.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Based on the provisions in Article 23 paragraph (5) letter a of the Company's Articles of Association, the Shareholders who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on Wednesday 31 May 2023 until 16:00 WIB.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (8) huruf (a), seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili setidaknya 120 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dapat mengusulkan mata acara Rapat jika diajukan secara tertulis melalui surat tercatat. Pengajuan usulan tersebut harus memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan, serta wajib dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan. Pengajuan usulan tersebut harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Pengambilan Rapat dikeluarkan.

Pursuant to the provisions in Article 21 paragraph (8) letter (a), One or more shareholders representing at least 120 (one in twenty) of the total shares of the Company with valid voting rights may propose an agenda of the Meeting if such proposal is submitted in writing by registered letter. The submission of proposal should comply with the requirements of Financial Services Authority Regulation and the Articles of Association of the Company, also with due regard to the Company's interest. The submission of the proposal must have been received by the Board of Directors of the Company at least 7 (seven) calendar days prior to the issuance of the Notice of the Meeting.

Perseroan merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemegang Saham dapat : (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System (“eASYKSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASYKSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Dalindo Entycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

The Company plans to convene the Meeting, which may be attended physically or electronically in accordance with the prevailing laws. The shareholders may: (i) attend the Meeting electronically and cast votes electronically by using the Electronic General Meeting System facility (“eASYKSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; or (ii) provide power of attorney electronically through eASYKSEI facility to an independent party appointed by the Company (PT Dalindo Entycom, the Company's Securities Administration Bureau) to attend and vote at the Meeting.

SIDOARJO, 17 MEI 2023
PT SIANTAR TOP TBK
Direksi/Board of Directors